

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2009). *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*. Jakarta: RMBOOKS.
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adnan, H. (2019). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2).
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4).
- Amaris, M. (2022). *Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Gampong Pineung Kota Banda Aceh*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Amir. (2024, November 19). Masyarakat. (T. Hidayat, Interviewer)
- Arif. (2024, November 19). Tokoh Masyarakat. (T. Hidayat, Interviewer)
- Arniti, N. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. doi:doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496
- Asrul. (2017). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait dengan Penguatan Hak Ulayat. *Jurnal Katalogis*, 5(3).
- Astomo, P. (2018, Juni). Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan Position and Constitutional Review of Village Rules in Legislation. *Jurnal Konstitusi*, 15(2).

- Bedi. (2024, November 19). Masyarakat. (T. Hidayat, Interviewer)
- Busriadi, R. (2022). Analisis Tugas dan Fungsi Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK: Jurnal Hukum Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, 3(2).
- Ciompoh, A., Festianto, D., & Mael, M. (2022). Partisipasi Pemilih Lansia di Desa T'eba dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020. *Jurnal Poros Politik*.
- Dilahur, D. (2016). Geografi Desa dan Pengertian Desa. *Forum Geografi*, 8(2).
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. doi:doi.org/10.29313/mimbar.v28i2.356
- Eti. (2024, November 19). Masyarakat. (T. Hidayat, Interviewer)
- Faisal. (2024, November 18). Kaur Keuangan Desa Karang Setra Kab. Pandeglang. (T. Hidayat, Interviewer)
- Faizal. (2015, Februari). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Ijtima'iyya*, 8(1).
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fauzi, A. (2022). *Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir)*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.
- Gunawan, H. (2024, November 11). Penjabat Kepala Desa Karangsetra Kab. Pandeglang. (T. Hidayat, Interviewer)

- Hajar, S., & Kholik, K. (2020, Juli). Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi*, 1(2).
- Hajar, S., Tanjung, I., Tanjung, Y., & Zulfahmi. (2017). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Hariri, A. (2019, September-Februari). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Herisasono, E., Ferdiati, Fadil, M., & Fatlah, R. (2023). Juridical Analysis of Requirements for Candidates for Village Apparatus Based on Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Apparatus Juncto Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning Appointment... *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2).
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Jamaludin, A. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jeddawi, M. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Jejen. (2024, November 18). Ketua BPD Desa Karang Setra Kab. Pandeglang. (T. Hidayat, Interviewer)
- Jumhayat. (2024, November 19). Masyarakat. (T. Hidayat, Interviewer)
- Kaloh. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kosasih, A. (2016). Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 1(1).
- Kunandar, A. (2019). *Memahami Teori-Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Galuh Patria.
- Laia, M., Simbolon, B., & Giawa, F. (2022). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*.
- Lasmana, H. (2017, November). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pangguk Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 2(2).
- Lestariyono, W., & Susanti, L. (2021). Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Jurnal Sociopolitico*. doi:doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.42
- Muslim, A. (2007). *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Perca.
- Nasution, K. (2017, Maret). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kantor Camat Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal LPPM UGN*, 7(3).
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurlia. (2020, Februari). The Role Of The Village Government To Improve Community Participation In Development (Study of Tellumpanua Village, Tanete Rilau District, Barru District). *Meraja Jurnal*, 3(1).
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. *Perspektif*, 8(1).

- Peraturan Desa Karangsetra Tahun 2020. (n.d.). *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025*.
- Permatasari, K., Pratiwi, R., & Suwondo. (2013). Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Purba, A. (2022). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2).
- Qodrat, A. (2024, November 18). Sekretaris Desa Karangsetra Kab. Pandeglang. (T. Hidayat, Interviewer)
- Ramawati. (2021). *Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasah)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sanjaya, W. (2015). *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Satriawan, M. (2013). Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Semaun, F. (2019, April). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pekan*, 4(1).
- Silvia. A. (2024, November 18). Kaur Perencanaan Desa Karangsetra Kab. Pandeglang. (T. Hidayat, Interviewer)

- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiman. (2018, Juli). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, D. (2016). *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sukmadinata, N. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukrino, D. (2016). *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi; Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Susilo, A. (2013, Juli). Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Sutinah, L. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Syafrudin, A., & Na'a, S. (2010). *Republik Desa: Pergaulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT. Alumni.
- Trisliatanto, D. (2020). *Metedologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Triwulan, T., & Widodo, I. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Umbara, C. (2014). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”*. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Publik. Retrieved Februari 09, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/>

Utami, F. (2017). Efektivitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis. *Jurnal Komunike*.

Wardani, L., Dewi, R., & Prayudi, M. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(3).

Widjaja. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yanto. (2024, November 18). Tokoh Masyarakat. (T. Hidayat, Interviewer)

Yassir, Mursalim, & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME: Journal of Management*. doi:doi.org/10.37531/yum.v5i2.1704

Yusuf, A. (2014). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Zufri, A., Zamzani, A., & Paramita, P. (2023). Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). *Dinamika*, 29(1).